

PROSEDUR PERENCANAAN DESA SUBSTANSI PENGEMBANGAN EKONOMI KE ARAH TRANSFORMASI EKONOMI: Studi Kasus di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung

*Village Planning Procedures for Economic Development
Towards Economic Transformation:
Case Study in Pangalengan District, Bandung Regency*



PENULIS



Teguh Winarno, S.Sos.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

Analis Kebijakan Ahli Muda



Gizdy Chalifa Chairul Rizaldi, S.P.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

Perencana Ahli Pertama



Tamaya Nikita Ishandoko, S.Sos.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama



Agits Agnia Fidzly Almatin, S.I.K.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

Penelaah Teknis Kebijakan



Nurakhmat Andi Sulistiyo, S.Kom.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN



Fitri Sarah Maulani, S.Ars.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN



Ridho Agung Nugroho, S.T.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam rangka perencanaan pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan sumber daya lokal dan inisiatif-inisiatif berbasis komunitas. Transformasi ekonomi merupakan proses mengubah struktur ekonomi dari yang tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah lebih tinggi. Transformasi ekonomi desa diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperluas akses terhadap pasar global. Permasalahan inti yang ditemui adalah desa sejauh ini belum memiliki perencanaan ekonomi yang sistematis dan mengarah pada transformasi ekonomi. Pemutakhiran data desa secara tahunan menjadi dasar penting untuk menggambarkan kondisi aktual desa dan memastikan rencana pembangunan yang relevan. Proses ini memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah desa, pendamping desa, penyuluh, serta pihak terkait lainnya. Tahapan perencanaan meliputi identifikasi masalah dan potensi yang dilakukan melalui pemetaan potensi lokal dan permasalahan, baik dengan metode sederhana maupun *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pemerintah desa, didukung pendamping desa dan masyarakat, berperan dalam pengumpulan data primer dan sekunder untuk mengidentifikasi potensi lokal, seperti sumber daya alam, manusia, serta infrastruktur. Tahap berikutnya adalah analisis data, menggunakan metode seperti *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) dan *Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal* (PESTEL) untuk mengevaluasi gap antara kondisi aktual dan target pembangunan desa. Analisis ini menjadi dasar untuk menyusun dokumen perencanaan ekonomi, yang dapat diintegrasikan ke dalam RPJM Desa atau RKP Desa. Dokumen ini dirancang secara partisipatif dengan bimbingan pendamping desa dan harmonisasi oleh pemerintah daerah agar selaras dengan kebijakan regional. Untuk keberhasilan transformasi ekonomi, diperlukan kolaborasi

lintas sektor, kebijakan yang mendukung, serta pendekatan spesifik sesuai karakteristik desa, seperti diversifikasi ekonomi dan hilirisasi. Pemerintah desa memimpin penyusunan dokumen yang mencerminkan visi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kata Kunci: hilirisasi; inovasi; perencanaan desa; tenaga kerja; transformasi ekonomi

EXECUTIVE SUMMARY

Village Development Planning is important to achieve continuous development in Indonesia, especially in the context of economic development planning at the local level. The village, as the smallest unit of government, plays an important role in improving the welfare of its community through the management of local resources and community-based initiatives. Economic transformation is the process of changing the economic structure from traditional to knowledge-based, innovation, and technology-driven economies that can create higher added value. Village economic transformation is expected to increase the added value of local products, create new job opportunities, and expand access to global markets. The core issue encountered is so far, villages do not have systematic economic planning that is directed towards economic transformation. Annual updates of village data are essential to depict the actual conditions of the village and ensure relevant development plans. This process requires active collaboration between village governments, village facilitators, advisors, and other related parties. The planning stages include identifying problems and potentials through mapping local potentials and issues, using both simple methods and Participatory Rural Appraisal (PRA). The village government, supported by village facilitators and the community, plays a role in collecting primary and secondary data to identify local potentials, such as natural resources, human resources, and infrastructure. The next stage is data analysis, using methods such as Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) and Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal (PESTEL) to evaluate the gap between actual conditions and village development targets. This analysis forms the basis for preparing economic planning documents, which can be integrated into the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) or the Village Government Work Plan (RKP Desa). These documents are designed participatively with guidance from village facilitators and harmonized by regional governments to align with regional policies. For successful economic transformation, cross-sector collaboration, supportive policies, and specific approaches tailored to village characteristics, such as economic diversification and downstream processing, are required. The village government leads the preparation of documents that reflect the vision of economic development based on local potentials.

Keywords: downstreaming; economic transformation; innovation; labor; village planning

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam rangka perencanaan pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Namun, dalam konteks ekonomi global yang dinamis, pendekatan pengembangan ekonomi desa harus mengalami transformasi untuk dapat bersaing dan relevan dengan perkembangan teknologi serta tuntutan pasar yang terus berubah. Sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menekankan transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan daya saing global, desa diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang mendukung diversifikasi ekonomi nasional. Transformasi ekonomi menurut Tajudin, dkk. (2020), adalah realokasi dinamis yang berasal dari sektor kurang produktif ke kegiatan atau sektor yang lebih produktif. Konsep transformasi ekonomi yang digagas pada RPJPN 2025-2045 merupakan proses mengubah struktur ekonomi dari yang tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah lebih tinggi. Perencanaan pembangunan daerah dapat memiliki fokus pada diversifikasi ekonomi melalui identifikasi serta mendorong industri, sektor, dan peluang bisnis baru. Dengan beragamnya sektor ekonomi regional, inisiatif perencanaan mampu mengurangi ketergantungan pada satu industri atau menjadikan daerah lebih tahan terhadap ketidakpastian ekonomi (Amrin, 2023). Prosedur perencanaan desa yang terintegrasi dengan substansi pengembangan ekonomi menuju transformasi ekonomi adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya bersifat sporadis dan sektoral, tetapi juga sistematis dan berkesinambungan. Dengan demikian, perencanaan desa yang selaras dengan RPJPN 2025-2045 akan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan berkelanjutan pada 2045.

Dalam *policy brief* ini, akan dibahas prosedur perencanaan desa dengan fokus pada pengembangan ekonomi yang mendukung transformasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan yang berbasis pada data empiris dan pandangan ahli guna membantu pemangku kebijakan desa merancang

strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun lokasi yang menjadi studi kasus dalam rangka analisis prosedur perencanaan desa pada substansi ekonomi adalah Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang meliputi Desa Margamulya, Desa Banjarsari, Desa Pulosari, dan Desa Pangalengan. Kecamatan Pangalengan dianggap dapat mewakili berbagai sektor komoditas seperti pertanian, perkebunan dan peternakan.

DESKRIPSI MASALAH

BUKTI-BUKTI

Substansi ekonomi dalam transformasi ekonomi pada RPJPN 2025-2045 Indonesia mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap 1 pada rentang tahun 2025-2029, transformasi ekonomi dititikberatkan pada hilirisasi sumber daya alam serta penguatan inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Lebih jauh apabila kita melakukan *cascading* dari Prioritas Nasional 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, maka terdapat indikator kegiatan prioritas yaitu persentase desa dengan keragaman ekonomi dengan aktivitas sektor lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu langkah menuju transformasi ekonomi adalah dengan membangun diversifikasi sektor ekonomi di desa melalui hilirisasi. Menurut Todaro dan Smith (2020), hilirisasi berkontribusi pada transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk domestik. Diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi akan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan mengembangkan keterampilan tenaga kerja.

Secara umum, Kecamatan Pangalengan memproduksi berbagai komoditas seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Berikut (**Tabel 1** dan **Tabel 2**) daftar produksi tertinggi untuk beberapa komoditas di wilayah Kecamatan Pangalengan.

Tabel 1. Data Produksi Tanaman Hortikultura Kecamatan Pangalengan

Tahun	Jenis Komoditas (Kuintal)					
	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Buncis
2022	159.086	118.292	498.200	218.175	254.774	75.878
2023	236.733	124.524	206.357	171.590	286.733	68.297

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Tabel 2. Data Produksi Tanaman Perkebunan Kecamatan Pangalengan

Tahun	Jenis Komoditas (Ton)	
	Kopi	Teh
2022	1.795,85	1.639,70
2023	1.881,68	1.639,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Lebih jauh, jika melihat hasil produksi komoditas setiap desa yang dikunjungi, maka Desa Margamulya memiliki komoditas unggulan kopi, Desa Pulosari memiliki komoditas unggulan pertanian hortikultura, Desa Pangalengan memiliki komoditas unggulan peternakan sapi perah, dan Desa Banjarsari memiliki komoditas unggulan pariwisata. Namun dalam pelaksanaannya, pihak swasta dan pemerintah desa belum memiliki keselarasan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi karena masyarakat secara langsung melakukan kerja sama dengan pihak swasta seperti yang dilakukan Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan (KPBS Pangalengan), PT. Perkebunan Nusantara (PTPN), dan Perusahaan Kopi Malabar. Sehingga saat ini kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Pelaku Bisnis masih terbatas pada penyediaan regulasi seperti ijin usaha dan penyediaan pasar bagi komoditas tertentu yang telah memenuhi standar produksi tertentu seperti ekspor kentang yang dilakukan Desa Pulosari melalui BUM Desa.

Beberapa permasalahan desa yang dikunjungi tim dapat disimpulkan dalam **Tabel 3** berikut.

Tabel 3. Permasalahan Desa

No.	Nama Desa	Komoditas Unggulan	Permasalahan
1.	Desa Margamulya	Pertanian Kopi	<ul style="list-style-type: none">• Belum ada rencana pengembangan komoditas utama yaitu kopi.• Adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola produksi kopi.
2.	Desa Pulosari	Pertanian Hortikultura	<ul style="list-style-type: none">• Belum ada rencana pengembangan pertanian hortikultura.• Harga saprotan yang meningkat karena keterbatasan pasokan.• Belum ada pelatihan yang dilakukan secara masif kepada petani untuk peningkatan produksi.
3.	Desa Pangalengan	Sapi Perah	<ul style="list-style-type: none">• Belum ada rencana pengembangan komoditas dari sapi perah.• Biaya pengelolaan ternak yang tinggi.• Belum adanya pengelolaan limbah dari ternak.• Belum adanya pelatihan yang dilakukan secara masif kepada peternak sapi perah untuk peningkatan produksi susu.• Ketersediaan pakan ternak.
4.	Desa Banjarsari	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola pariwisata.• Sampah dari tempat wisata yang belum terkelola.• Belum ada rencana pengembangan pariwisata di desa.

Sumber: data primer (2024) diolah

Berdasarkan **Tabel 3**, masalah yang sama-sama dihadapi oleh Desa adalah belum ada perencanaan yang matang terhadap pengembangan sektor ekonomi unggulan secara tertulis. Pada dokumen RPJM Desa belum dilakukan pembahasan perencanaan ekonomi secara matang. Pengembangan ekonomi masih terfokus pada pengembangan infrastruktur namun belum ada perencanaan substansi ekonomi pada bidang lain seperti pemberdayaan masyarakat secara sistematis. Hal ini menjadikan desa-desa masih belum memiliki dokumen perencanaan ekonomi menuju arah transformasi ekonomi yang komprehensif.

ANALISIS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data melalui deskripsi atau gambaran data yang telah didapat sebagaimana adanya. Metode ini dapat menggambarkan sejauh mana desa menggambarkan proses perencanaan ekonomi dan kesiapan desa untuk melaksanakan transformasi ekonomi.

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, program pada proses perencanaan RPJM Desa perlu diselaraskan dengan SDGs Desa. Pada proses pendataan SDGs desa, potensi dan permasalahan desa sudah termasuk ke dalam data SDGs Desa. Namun perlu penegasan terkait pemutakhiran data SDGs Desa yang menjadi dasar pembangunan desa menurut Permendes PDTT. Penggalian potensi dan kendala seharusnya dilaksanakan secara berkala terutama pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi merupakan sektor yang dinamis dan dipengaruhi banyak faktor internal maupun eksternal. Sehingga peran dan pelibatan masyarakat melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembug warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa menjadi sangat penting. Tahapan ini perlu dilaksanakan berdasarkan beberapa tema seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Hasil dari diskusi ini nantinya menjadi bahan masukan RPJM Desa atau RKP Desa. Pada dokumen RPJM Desa perlu ditambahkan sub-bab khusus terkait perencanaan pembangunan ekonomi desa dengan alur sebagaimana **Gambar 1**.



Gambar 1. Alur Penyusunan RPJM Desa

Sumber: Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perencanaan desa jangka menengah memang sudah diwajibkan untuk dilakukan perincian per tahun. Hal ini sesuai dengan matriks RPJM Desa pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pendapat ini searah dengan pendapat David dan David (2016) yang menyebutkan bahwa perincian tahunan memungkinkan organisasi untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan jangka panjang. Sasaran tahunan dapat dijadikan parameter untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai visi strategisnya. Sehingga, perlu ditentukan rincian kegiatan per tahun yang dijadikan sebagai parameter atau *milestone*. Dalam merumuskan perencanaan substansi ekonomi desa ke arah transformasi desa, setidaknya terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan transformasi ekonomi di desa. Indikator tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Diversifikasi ekonomi: menurut Todaro dan Smith (2020), salah satu indikator transformasi ekonomi yang paling penting adalah diversifikasi ekonomi. Hal ini digambarkan dengan sektor ekonomi di desa bukan hanya satu dan sudah ada penambahan sektor ekonomi turunan dari sektor ekonomi utama.
2. Peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi: menurut (Frikha dan Gabsi, 2024), Salah satu ciri terjadinya transformasi ekonomi adalah dengan peningkatan nilai tambah sektor ekonomi non produktif kepada sektor ekonomi produktif.
3. Adopsi teknologi dan Inovasi: teori *creative destruction* menurut Schumpeter (1942), menyebut bahwa inovasi teknologi baru menjadi pendorong utama dalam transformasi ekonomi.
4. Peningkatan keterampilan masyarakat: teori pertumbuhan endogen menurut Romer (1990) menekankan peningkatan kapasitas SDM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil dari observasi dan wawancara langsung dengan narasumber di Kecamatan Pangalengan, rata-rata menyatakan sudah ada kesiapan menuju arah transformasi ekonomi. Sektor-sektor ekonomi unggulan yang dijadikan fokus pada *policy brief* ini antara lain sektor pertanian (kopi), pertanian (hortikultura), peternakan (sapi perah), dan pariwisata. Semua sektor tersebut sudah memiliki peluang untuk mengarah pada transformasi ekonomi. Indikator transformasi ekonomi yang akan digunakan antara lain pengetahuan desa terkait transformasi ekonomi. Berdasarkan empat indikator transformasi ekonomi tersebut, Desa Pangalengan, khususnya KPBS Pangalengan dan Desa Pulosari, telah menerapkan diversifikasi ekonomi serta peningkatan nilai tambah di berbagai sektor. Selain menjual susu segar dan susu pasteurisasi, KPBS Pangalengan juga memproduksi berbagai produk turunan. Produk unggulan Desa Pulosari adalah pertanian hortikultura, seperti kentang. Produk yang dijual tidak hanya berupa bahan mentah, tetapi beberapa warga Pulosari juga menjual kentang dalam bentuk keripik. Meskipun sebagian besar lahan perkebunan di Desa Banjarsari dimiliki oleh PTPN, namun desa mampu menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun destinasi wisata yang telah mengadopsi teknologi dan inovasi, seperti sistem tiket dan wahana permainan. Desa Margamulya telah melaksanakan peningkatan keterampilan masyarakat melalui kegiatan pelatihan serta optimalisasi potensi alam secara berkelanjutan. Perusahaan Kopi Malabar menerapkan prinsip keberlanjutan dengan tidak hanya mengeksplorasi kebun kopi, tetapi juga melakukan penanaman kembali. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa desa sudah siap melakukan transformasi ekonomi.

REKOMENDASI

SOLUSI

Perencanaan desa menjadi salah satu hal yang penting dalam mendukung transformasi ekonomi sesuai dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Pemutakhiran data desa perlu dilaksanakan setiap tahun untuk menggambarkan kondisi terkini desa. Proses pemutakhiran data desa perlu melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, pendamping desa, penyuluh pertanian, dan pihak lainnya. Pelibatan masyarakat melalui kelompok diskusi terpimpin dan/atau rembug warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan desa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menjadi tahapan yang perlu dilaksanakan secara terfokus terutama pada aspek sosial dan ekonomi sebagaimana **Gambar 2**.



Gambar 2. Alur Penyusunan RPJM Desa dengan *Highlight* pada Diskusi Publik

Sumber: Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Diskusi ini diharapkan dapat melahirkan dokumen perencanaan secara tematik terlebih dahulu sebagai masukan ke dalam tahap penyusunan RPJM Desa. Hal yang perlu dilaksanakan pada proses diskusi pra penyusunan RPJM Desa antara lain sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah dan Potensi

Identifikasi masalah dan potensi merupakan salah satu langkah penting dalam proses perencanaan substansi ekonomi di desa. Proses Identifikasi ini dapat berupa metode pemetaan sederhana atau menggunakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Kemendes PDTT dapat menyediakan panduan teknis untuk identifikasi potensi dan permasalahan ekonomi desa serta menyiapkan alat bantu seperti format survei, format laporan, dan aplikasi pendukung (misalnya, SID). Pemerintah daerah dapat mendukung data sekunder terkait sektor ekonomi unggulan regional yang relevan untuk desa. Pada tahap ini pendamping desa dapat berperan untuk mendampingi proses identifikasi di desa, termasuk pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan musyawarah. Pemerintah desa dapat melaksanakan proses musyawarah desa untuk mengidentifikasi masalah dan potensi ekonomi berdasarkan masukan dari masyarakat serta mengumpulkan data potensi lokal, termasuk sumber daya alam, manusia, budaya, dan infrastruktur desa.

2. Proses Analisis Data

Proses analisis data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari proses identifikasi potensi dan masalah. Menurut Nursetiawan dan Rifki (2021), bahwa data dan informasi merupakan bagian yang paling penting dalam penentuan kebijakan, khususnya pemerintah desa. Data yang sudah tersedia merupakan salah satu kekuatan yang perlu dimanfaatkan seperti data SDGs Desa atau data IDM. Proses analisis data dapat berupa proyeksi data, analisis SWOT, analisis lingkungan eksternal melalui metode PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal*), dan analisis lain

yang mampu mendukung proses perencanaan di desa substansi ekonomi. Perlu ditekankan bahwa dalam proses perencanaan diperlukan target yang ingin dicapai dan kondisi terkini agar terlihat *gap* atau kesenjangan yang menjadi dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan. Kementerian Desa PDTT mendukung dengan menyediakan pelatihan teknis untuk pemerintah daerah, pendamping desa, dan pemerintah desa terkait analisis data. Pemerintah daerah menganalisis keterkaitan potensi antar-desa dalam konteks pembangunan kawasan serta memberikan arah agar hasil analisis desa sesuai dengan kebijakan daerah. Pendamping desa berperan mendukung pemerintah desa dalam analisis partisipatif bersama masyarakat dan membantu merumuskan rekomendasi strategis. Pemerintah desa sendiri memanfaatkan hasil analisis untuk menetapkan prioritas program yang berpotensi membawa dampak transformasi ekonomi bagi masyarakat.

3. Menyusun Dokumen Perencanaan Substansi Ekonomi Desa

Dokumen perencanaan substansi ekonomi di desa dapat dibuat menjadi beberapa dokumen atau menjadi salah satu substansi dalam dokumen perencanaan yang sudah ada seperti RPJM Desa atau RKP Desa. Perencanaan substansi ekonomi desa secara jangka panjang dapat dimasukkan ke dalam dokumen RPJM Desa. Pada matriks lampiran penyusunan RPJM Desa, terdapat kolom untuk kegiatan yang akan dilaksanakan selama 8 tahun. Hal tersebut dapat dimanfaatkan desa untuk melakukan perencanaan dan memecah perencanaan desa per-tahun yang nanti diterjemahkan ke RKP Desa masing-masing tahun. Perencanaan substansi ekonomi desa dapat masukkan ke dalam sub-bab khusus pada RPJM Desa sehingga mendapatkan *spotlight* khusus. Kemendes PDTT menyediakan format dokumen yang sesuai dengan kebijakan nasional serta memberikan supervisi agar dokumen tersebut sesuai standar. Pemerintah daerah berperan dalam harmonisasi dokumen desa dengan RPJMD kabupaten/kota dan memberikan masukan strategis agar program desa mendukung pembangunan daerah. Pendamping desa membimbing proses penyusunan dokumen secara partisipatif, memastikan rencana desa mengandung strategi transformasi berbasis potensi lokal. Sementara itu, pemerintah desa memimpin penyusunan dokumen, mengintegrasikan masukan masyarakat dan mitra kerja, serta memastikan dokumen mencerminkan visi dan prioritas pembangunan ekonomi desa. Beberapa indikator yang dapat menjadi acuan antara lain diversifikasi ekonomi, peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi, adopsi teknologi dan inovasi, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Setelah dokumen ini selesai maka dapat diberikan kepada tim penyusun RPJM Desa sebagai masukan ke dalam dokumen RPJM Desa.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Unsur transformasi ekonomi di desa perlu menjadi unsur yang diampu oleh unit kerja baik di Kementerian Desa PDT atau unit kerja di daerah. Urgensi perlunya pengampu unsur transformasi ekonomi adalah untuk memastikan proses transformasi ekonomi yang akan berjalan di desa seperti hilirisasi, diversifikasi ekonomi, dan unsur yang telah disebutkan pada analisis. Unit yang menangani transformasi ekonomi di desa nantinya perlu membuat pedoman transformasi ekonomi di desa.
2. Melaksanakan pelatihan aktor perencanaan di desa dalam hal ini kepala urusan (kaur) perencanaan di desa. Pelatihan ini untuk mendukung kemampuan aparatur desa sebagai orkestrator dalam penyusunan dokumen perencanaan desa.
3. Diperlukan kolaborasi dari K/L/D untuk mengawal transformasi ekonomi di desa karena melibatkan pihak dari multi sektor. Kolaborasi ini sejatinya perlu dilakukan sejak proses perencanaan. Kemendes PDT perlu menyiapkan kebijakan terkait arah transformasi ekonomi desa dan nantinya dapat diturunkan menjadi peraturan di tingkat daerah.
4. Perlu pendekatan intervensi yang asimetris dalam proses perencanaan substansi ekonomi karena sektor usaha satu dengan yang lain pasti akan berbeda proses pelaksanaan transformasi ekonomi yang akan dilakukan. Sehingga perlu dibuat model-model pendekatan pengembangan sektor ekonomi di desa untuk mendukung transformasi ekonomi.

REFERENSI UTAMA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 31 Desember 2014. Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2029. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 21 Desember 2020. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1633. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Bandung Dalam Angka 2024*. Bandung: Badan Pusat Statistik RI.
- David, F.R., & Forest R.D. (2016). *Manajemen Strategik Edisi 15*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Frikha, Nihel & Gabsi, Foued Badr. (2024). Structural Transformation, Poverty, and Inequality in Emerging Countries. *Theoretical and Applied Economics*, 31(3)(640), A, 149-166.
- Nursetiawan, Irfan, & Putra, Rifki Agung Kusuma. (2021). Data dan Sistem Informasi Desa dalam Era Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 463-471.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd edition)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rodrik, D. (2007). *Industrial Policy for the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press.
- Romer, Paul M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), <https://doi.org/10.1086/261725>.
- Schumpeter, J.A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tajudin; Syarif, Muhammad; Natsir, M; & Nur, Syamsir. (2020) Dampak Transformasi Struktur Ekonomi Indonesia Terhadap Mobilitas Pekerja Antar Sektor. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), 83-94.
- Todaro, Michael Paul., & Smith, Stephen C. (2020). *Economic Development (13th Edition)*. Hoboken, NJ: Pearson.
- Wibowo, Edi. (2008). *Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Surakarta.
- Yin, R.K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: Guilford.